



Analisis Kesesuaian Pemanfaatan Ruang di Lingkungan Pesisir Kecamatan Barru Kabupaten Barru Sulawesi Selatan

The Suitability Analysis of Space Use in the Coastal Environment of Barru District Barru Regency South Sulawesi

Hasriyanti¹

Universitas Negeri Makassar, Kota Makassar, Indonesia

Winda Asriana

Universitas Negeri Makassar, Kota Makassar, Indonesia

Erman Syarif

Universitas Negeri Makassar, Kota Makassar, Indonesia

Maisarah Munirah Latief

Universitas Negeri Makassar, Kota Makassar, Indonesia

Titus Adeyemi Alonge

University of Energy and Natural Resources (UENR), Sunyani, Ghana

Ogunrinde Emmanuel Abiola

Ladoke Akintola University of Technology, Ogbomosho, Nigeria

Artikel Masuk : 10 Mei 2024

Artikel Diterima : 18 Maret 2025

Tersedia Online : 30 April 2025

Abstrak: Ditetapkannya Kecamatan Barru sebagai pusat kota Kabupaten Barru, berdampak semakin meningkatnya aktivitas pembangunan di beberapa wilayah terkhusus di sepanjang pesisir pantai Kecamatan Barru semakin hari semakin nyata terjadi. Disisi lain, pemanfaatan lahan semakin kurang tepat penggunaannya seiring dengan potensi yang juga semakin berkembang. Sehingga kemampuan wilayah pesisir semakin menurun dalam menampung aktivitas maupun kegiatan di dalamnya serta potensi ekosistem pesisir yang ada menjadi rusak. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kondisi eksisting penggunaan lahan dan kesesuaiannya terhadap RTRW di kawasan pesisir Kecamatan Barru. Penggunaan metode penelitian yakni deskriptif kuantitatif dengan menggunakan analisis spasial terhadap Citra SPOT-6 yang menginterpretasikan *overlay* penggunaan lahan dengan peta RTRW Tahun 2011-2031 Kabupaten Barru. Penelitian ini memberikan hasil bahwa adanya ketidaksesuaian pemanfaatan ruang di Kawasan pesisir seluas 1194,96 Ha atau 26,48% sedangkan 3318,01 Ha atau 73,52% pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRW.

¹ Korespondensi Penulis: Hasriyanti
Email: hasriyanti@unm.ac.id

How to Cite

Hasriyanti, H., Asriana, W., Syarif, E., Latief, M. M., Alonge, T. A., & Abiola, O. E., (2025). Analisis Kesesuaian Pemanfaatan Ruang di Lingkungan Pesisir Kecamatan Barru Kabupaten Barru Sulawesi Selatan. *Jurnal Wilayah dan Lingkungan*, 13(1), 63-74. doi: 10.14710/jwl.13.1.63-74

Kata Kunci: Analisis Kesesuaian; Pemanfaatan Ruang; Lingkungan Pesisir

Abstract: *The establishment of Barru District as the city center of Barru Regency has an impact on increasing development activities in several areas, especially along the coast of Barru District, which are increasingly evident. On the other hand, land use is increasingly inappropriate in line with the potential that is also increasingly developing. So that the ability of coastal areas to accommodate activities and activities in them is decreasing and the potential for existing coastal ecosystems is damaged. This study was conducted with the aim of determining the existing condition of land use and its suitability for the RTRW in the coastal area of Barru District. The use of the research method is descriptive quantitative using spatial analysis of SPOT-6 Imagery which interprets land use overlay with the 2011-2031 RTRW map of Barru Regency. This study provides results that there is a mismatch in spatial use in the coastal area of 1194.96 Ha or 26.48% while 3318.01 Ha or 73.52% of spatial use is in accordance with the RTRW.*

Keywords: *Suitability Analysis, Spatial Utilization, Coastal Environment.*

Pendahuluan

Penataan ruang pada hakikatnya diyakini sebagai pendekatan yang tepat dalam mewujudkan sarana optimal pemanfaatan ruang yang berdayaguna dan berhasil guna bagi semua kepentingan (Freitas et al., 2022). Berdasarkan hal tersebut, penataan ruang yang sesuai diperlukan yang meliputi kegiatan merencanakan, pemanfaatan, dan pengendalian yang peruntukannya agar ruang nusantara berkelanjutan, produktif, nyaman, dan aman dapat terwujud (Jattak & Wu, 2023).

Namun, adanya penyalahgunaan fungsi ruang akan menimbulkan beberapa permasalahan (Manasseh et al., 2017). Permasalahan yang dimaksud diantaranya cakupan bencana dan frekuensinya yang semakin meningkat, kumuhnya lingkungan perumahan, lingkungan yang tercemar, kekeringan di musim kemarau, banjir di musim hujan, dan kemacetan lalu lintas (Simamora & Andrie Gusti Ari Sarjono, 2022).

Manusia memiliki situs strategi yaitu wilayah laut dan pesisir yang memiliki sumber daya yang melimpah dimana dapat dimanfaatkan oleh manusia dari lingkungan laut sekaligus maupun yang ada di darat (Hasriyanti & Syarif, 2021). Secara keseluruhan potensi sumberdaya pesisir dan lautan merupakan sumber pertumbuhan dan tumpuan utama bagi dukungannya terhadap pembangunan secara berkelanjutan (Hasriyanti, 2021). Hal ini berhubungan dengan kondisi wilayah pesisir yaitu pertuan antara daratan serta lautan yang antara satu sama lain saling mempengaruhi, bahkan secara sosial ekonomi maupun biogeofisik (Hasriyanti et al., 2021). Menurut (Khaerani et al., 2018) bahwa umumnya, pengertian dari kawasan pesisir yaitu wilayah yang rentan terhadap kerusakan lingkungan akibat aktivitas manusia dikarenakan tingginya tingkat pemanfaatan dari kawasan pesisir. Tidak terkendalinya perubahan penggunaan lahan adalah ancaman terhadap kelestarian sumber daya maupun daya dukungnya (Hasriyanti et al., 2023).

Salah satu sektor yang paling menonjol di Kecamatan Barru adalah sektor kelautan dan perikanan. Kecamatan Barru ditetapkan sebagai pusat kota Kabupaten Barru, berdampak semakin meningkatnya aktivitas pembangunan di beberapa wilayah terkhusus disepanjang pesisir pantai Kecamatan Barru semakin hari semakin nyata terjadi (Hasriyanti, 2014). Namun, pemanfaatan lahan yang kurang tepat penggunaannya berpotensi ikut seiring dengan perkembangan tersebut. Akibatnya, turunnya kapasitas wilayah pesisir dalam menadah seluruh aktivitas ataupun kegiatan yang ada di dalamnya serta potensi ekosistem pesisir menjadi rusak (Sanga et al., 2022). Hal ini didukung oleh Khaerani (2018) yang menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur kota yang masif seringkali tidak memperhatikan keseimbangan ekosistem dan kualitas lingkungan.

Analisis suatu wilayah dapat lebih mudah untuk dilakukan dengan adanya peran dari penginderaan jauh dikarenakan objek dapat diteliti tanpa secara langsung berhubungan dengan objek tersebut (Pahleviannur, 2019) Untuk itu, penelitian ini menggunakan Citra SPOT-6 dan dianalisis menggunakan SIG untuk memudahkan dalam menganalisis suatu lahan (Rezapour et al., 2020). Salah satu bagian dari sistem informasi yaitu *Sistem Informasi Geografis* yang dimana fitur data atau spasial serta analisis ditambahkan di dalamnya dengan harapan pengguna dapat terbantu dalam melakukan analisis maupun memahami lebih komprehensif permasalahan yang ada.

Berdasar dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mubarak (2024) yang menitikberatkan pada aspek keberlanjutan sosial, ekologi, dan teknologi di pesisir Barru, namun kurang dalam menawarkan solusi konkret untuk konflik lahan dan kerentanan lingkungan yang lebih kompleks. Pada penelitian Foley (2010) membahas pentingnya perencanaan spasial berbasis ekosistem di lautan, namun konteks internasional yang diusungnya kurang relevan dengan pengelolaan pesisir daratan lokal seperti Barru. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Manaf (2016) dalam kajiannya terhadap wilayah pesisir Kepulauan Selayar, memberikan analisis yang bersifat deskriptif tanpa metode kuantitatif yang kuat dalam mengevaluasi kesesuaian lahan. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Nurliza (2018) mengangkat pentingnya kebijakan strategis berbasis kondisi lokal di Sambas, namun keterkaitannya dengan konteks Sulawesi Selatan masih terbatas, dan metode yang digunakan seperti *AHP* dan *Rap-Coastal*, memerlukan adaptasi jika diterapkan di Barru. Kelemahan-kelemahan tersebut menunjukkan perlunya pendekatan analisis spasial yang lebih terfokus pada karakteristik lokal di pesisir Barru serta integrasi solusi keberlanjutan yang komprehensif yang menjadi inti dari penelitian ini.

Berpijak pada problematika yang telah diuraikan di atas, maka hal ini mendasari dilakukannya penelitian ini. Penelitian ini memiliki permasalahan yang akan diteliti yakni kondisi eksisting penggunaan lahan dan kesesuaiannya terhadap RTRW agar dapat memberikan masukan untuk kebijakan lingkungan berkelanjutan yang dapat diterapkan di kawasan pesisir Kecamatan Barru.

Metode Penelitian

Metode deskriptif kuantitatif adalah metode yang digunakan dalam penelitian ini. Sehingga arah dari penelitian yang dilakukan yaitu pada pengungkapan permasalahan atau kondisi yang sebenarnya. Sesuai dengan jenis penelitiannya yaitu deskriptif kuantitatif, maka penelitian ini digambarkan dalam bentuk angka, dan tabel yang memiliki makna.

Terdapat dua pembagian variabel pada penelitian yang dilakukan yakni *independent variable* atau variabel independen dan *dependent variable* atau variabel terikat.

- Variabel terikat (X): Penggunaan Lahan
- Variable bebas (Y) : Kesesuaian Pemanfaatan Ruang

Penelitian ini membutuhkan jenis data yang jenisnya ada dua yaitu data primer dan data sekunder. Data peneliti kumpulkan dengan penggunaan teknik yang dijelaskan berikut:

1. Data primer

Data yang secara langsung peneliti peroleh dari sumbernya merupakan pengertian dari data primer. Data ini didapatkan dengan kegiatan interview atau wawancara bebas dan *ground check* yakni data penggunaan lahan berupa dokumentasi sebagai validasi dan verifikasi dalam mengecek ketepatan, kebenaran dan kenyataan dilapangan.

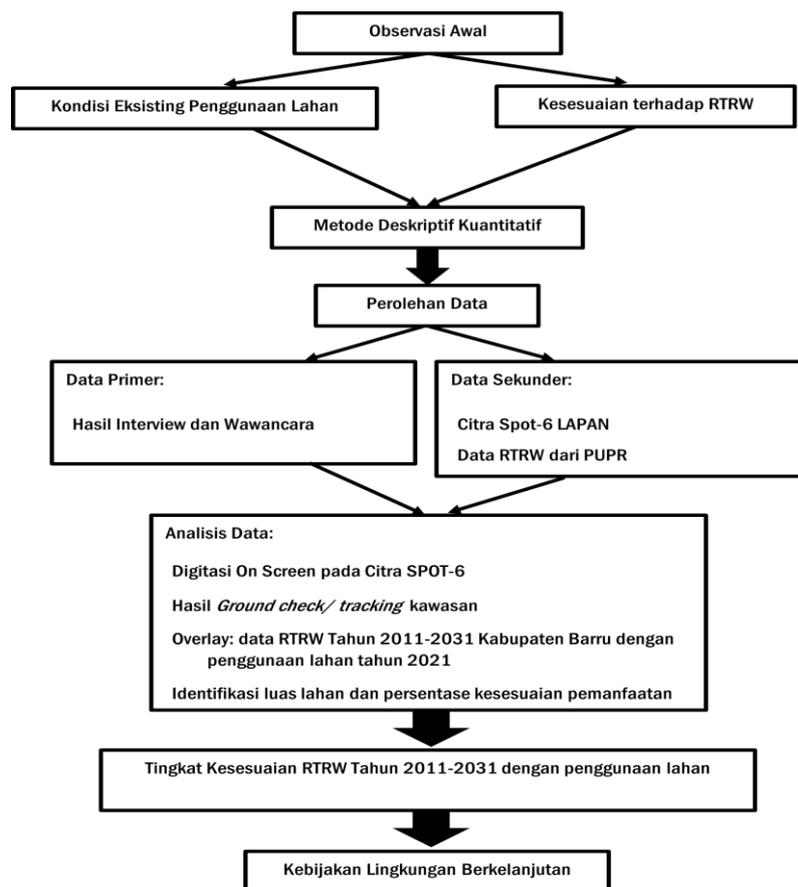
2. Data Sekunder

Data yang peneliti peroleh dari berbagai instansi terkait merupakan pengertian dari data sekunder. Data ini seperti Citra Spot-6 LAPAN dan data RTRW yang diperoleh dari PUPR.

Data penelitian ini diolah dengan bantuan Sistem Informasi Geospasial. Sistem informasi geografis (SIG) ialah seperangkat alat yang penggunaannya untuk melakukan analisis maupun memetakan peristiwa serta hal yang di muka bumi ini terjadi berupa alat computer. Berikut ini secara rinci peneliti jelaskan data diolah serta dianalisis dengan tahapan:

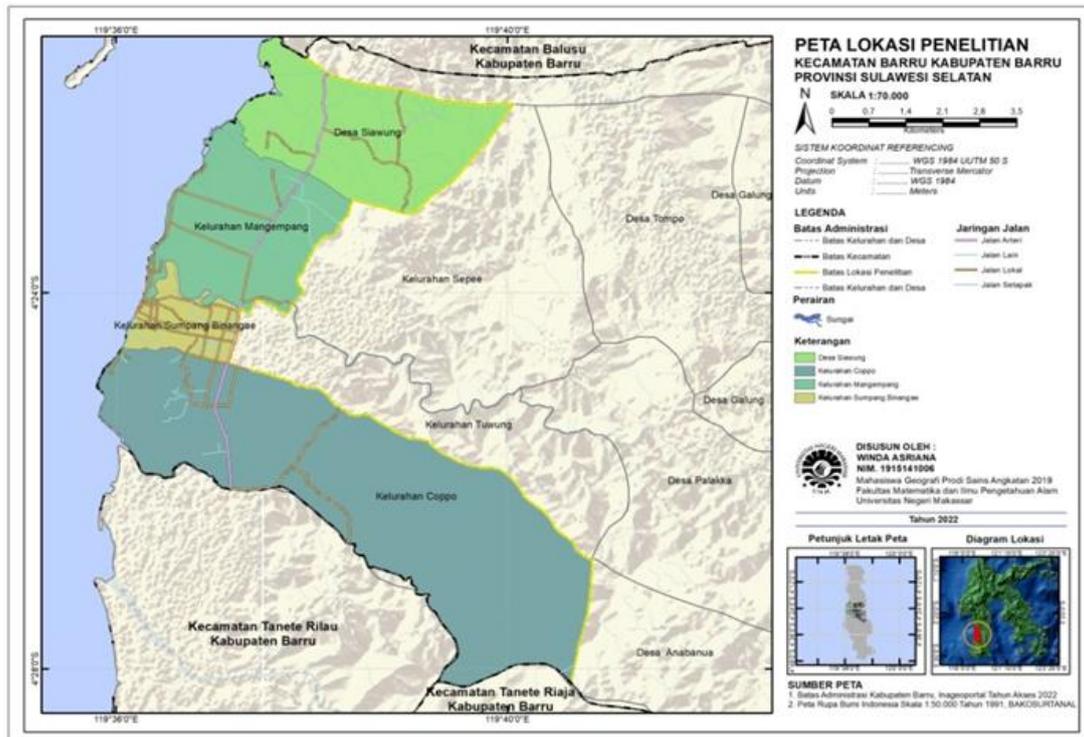
- a. Digitasi *On Screen* dilakukan untuk menginterpretasikan penggunaan lahan melalui Citra SPOT-6.
- b. Melakukan *Ground Check* di beberapa penggunaan lahan untuk mengecek ketepatan dan kebenaran dilapangan.
- c. Menganalisis kesesuaian pemanfaatan ruang dengan teknik *overlay* yaitu menumpang susunkan data RTRW Tahun 2011-2031 Kabupaten Barru dengan penggunaan lahan tahun 2021.
- d. Mengidentifikasi luas lahan dan persentase kesesuaian pemanfaatan ruang di kawasan pesisir Kecamatan Barru.
- e. Melakukan wawancara bebas kepada masyarakat sekitar terhadap permasalahan yang diteliti.

Langkah penelitian yang akan dilakukan akan ditunjukkan dalam diagram alir penelitian pada gambar 1 berikut.



Gambar 1. Diagram Alur Penelitian

Lokasi penelitian ini dikhususkan pada wilayah pesisir di Kecamatan Barru yaitu seluruh Administratif Kecamatan Barru yang berbatasan langsung dengan laut, sebagaimana dalam Undang-Undang yang telah ditetapkan terkait Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Daratan yaitu Nomor 27 Tahun 2007 dimana administrasi Pulau-Pulau Kecil tercakup didalamnya, kea rah laut yang ditetapkan sejauh 12 mil dikukur dari garis pantai serta ke arah kecamatan. PP Nomor 25 Tahun 2000 merupakan acuan kea rah laut, dimana sejauh 4 mil pengelolaannya adalah kewenangan kota/kabupaten. Penelitian ini memiliki ruang lingkup penelitian diantaranya desa dan kelurahan yaitu Kelurahan Coppo, Kelurahan Sumpang Binangae, Kelurahan Mangempang, dan Desa Siawung. Gambar 2 berikut menunjukkan peta lokasi penelitian.



Gambar 2. Peta Lokasi Penelitian

Hasil dan Pembahasan

Penggunaan Lahan Kawasan Pesisir Kecamatan Barru

Hasil analisis data menunjukkan bahwa penggunaan lahan di kawasan pesisir Kecamatan Barru menunjukkan bahwa terdapat 5 jenis pengelompokan penggunaan lahan di kawasan ini. Penggunaan lahan yang mendominasi adalah hutan seluas 2020,45 ha dengan persentase 44,64%, kemudian perkebunan seluas 799,91 ha atau 17,67%, pemukiman seluas 697,19 ha atau 15,40%, sawah seluas 526,13 ha atau 11,62% dan penggunaan lahan tambak yang paling sedikit yakni 482,78 ha dengan persentase 10,67%. Pengelompokan tersebut berfungsi sebagai pengelompokan nilai reflektasi dari setiap objek kedalam kelas-kelas tertentu sehingga mudah dikenali (Hidayah & Suharyo, 2018). Untuk melihat secara detail, diagram 1 di bawah ini menunjukkan penggunaan lahan Kecamatan Barru di kawasan pesisir.

Tabel 1. Penggunaan Lahan Kawasan Pesisir Kecamatan Barru

No.	Penggunaan Lahan	Luas		Persentase (%)
		(Ha)	(Km)	
1.	Hutan	2020,45	20,20	44,64
2.	Perkebunan/Kebun	799,91	8,00	17,67
3.	Pemukiman dan Tempat Kegiatan	697,19	6,97	15,40
4.	Sawah	526,13	5,26	11,62
5.	Tambak	482,78	4,83	10,67
Total		4526,46	45,26	100

Pola Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barru Tahun 2011-2031

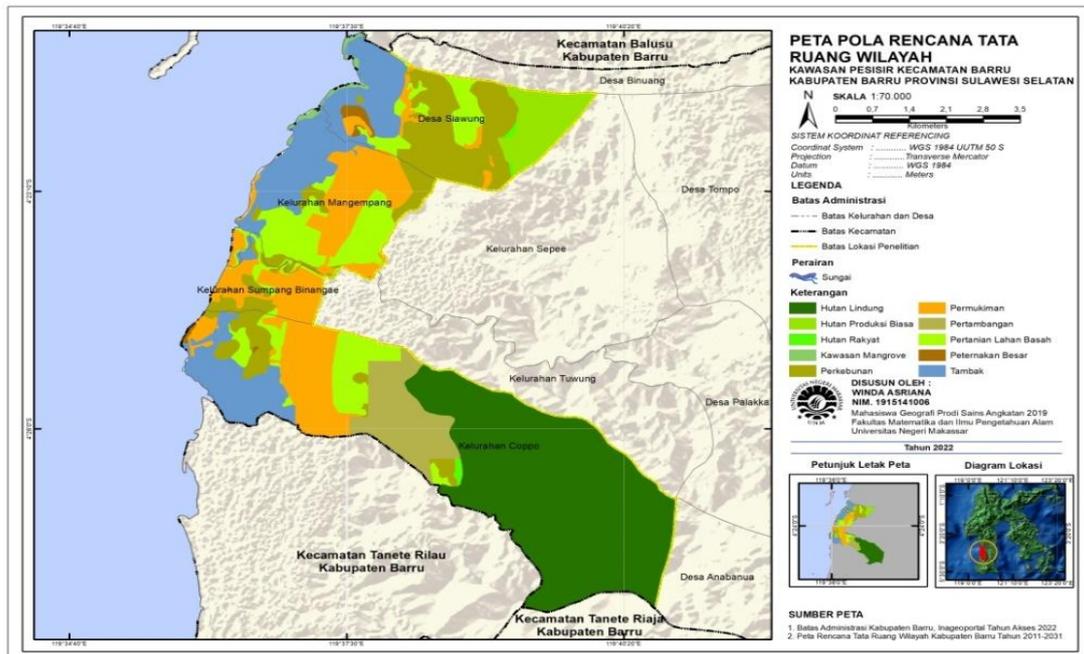
Merujuk pada rencana pola ruang di kawasan pesisir Kecamatan barru berdasarkan RTRW Tahun 2011-2031. Hasil menunjukkan bahwa terdapat 2 jenis fungsi kawasan yaitu kawasan lindung yang terdiri dari hanya 2 jenis klasifikasi yaitu hutan lindung dan kawasan mangrove, sedangkan Kawasan Budidaya yang terdiri dari 8 jenis klasifikasi yaitu tambak, perkebunan, pertanian lahan basah, pertambangan, hutan produksi biasa, peternakan besar, permukiman, dan hutan rakyat (Hasriyanti, 2021). Sehingga terlihat perbandingan luas klasifikasi RTRW secara keseluruhan, rencana pola ruang didominasi Hutan lindung dengan persentase 31,51% atau seluas 1421,35 ha. Sedangkan kawasan tambak merupakan pemanfaatan terendah atau berada di urutan terakhir yang memiliki persentase 0,27% atau hanya 12,29 ha. Untuk lebih rincinya dapat dilihat pada tabel 2 dan diagram 2 sebagai berikut.

Tabel 2. Pola Rencana Tata Ruang Wilayah Kawasan Pesisir Kecamatan Barru Tahun 2011-2031

Fungsi Kawasan	Klasifikasi Rencana Tata Ruang Wilayah	Luas		Persentase (%)
		(Ha)	(Km)	
Kawasan Lindung	Hutan Lindung	1421,35	14,21 31,51	
	Kawasan Mangrove	24,00	0,24	0,53
	Tambak	12,29	0,12	0,27
Kawasan Budidaya	Perkebunan	23,56	0,24	0,52
	Pertanian Lahan Basah	599,97	6,00	13,30
	Pertambangan	743,16	7,43	16,48
	Hutan Produksi Biasa	280,62	2,81	6,22
	Peternakan Besar	563,96	5,64	12,50
	Permukiman	181,64	1,82	4,03
	Hutan Rakyat	659,88	6,60	14,63
Total		4510,43	45,11	100

Sumber : Pemerintah Daerah, 2022

Pola Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kawasan Pesisir Kecamatan Barru Tahun 2011-2031 dapat dilihat pada gambar 3 melalui peta berikut.



Gambar 3. Pola Rencana Tata Ruang Wilayah Kawasan Pesisir Kecamatan Barru Tahun 2011-2031

Pola Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kawasan Pesisir Kecamatan Barru Tahun 2011-2031 menyoroti pentingnya pengelolaan berkelanjutan, di mana kawasan lindung seperti hutan lindung dan mangrove, yang mencakup 14,45% dari total wilayah, berfungsi sebagai pelindung lingkungan dan mitigasi bencana. Kawasan budidaya, seperti tambak, pertanian lahan basah, dan peternakan besar, mendukung ekonomi lokal, namun aktivitas pertambangan yang mencakup 7,43% perlu pengawasan ketat untuk mencegah degradasi lingkungan. Artikel oleh Junarto (2023) menegaskan pentingnya pengelolaan ruang yang seimbang antara ekonomi dan lingkungan dalam konteks pesisir.

Kesesuaian Pemanfaatan Ruang di Kawasan Pesisir Kecamatan Barru

Pada hasil analisis, hutan merupakan klasifikasi pemanfaatan ruang yang paling sesuai dengan RTRW yaitu sebesar 1418,90 atau 31,38%, Sedangkan pemanfaatan ruang yang paling banyak tidak sesuai adalah sawah seluas 266,31 ha atau 5,89% yang dalam RTRW direncanakan sebagai kawasan permukiman tapi belum terlaksana sehingga terjadi pelanggaran rencana tata ruang. Sedangkan secara keseluruhan terdapat 1194,96 Ha atau 26,48% pemanfaatan ruang yang tidak sesuai sedangkan 3318,01 Ha atau 73,52% pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRW. Lebih jelasnya disajikan pada tabel 3, tabel 4 dan diagram 3 berikut.

Tabel 3. Keseluruhan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kawasan Pesisir Kecamatan Barru

Kriteria	Rencana Tata Ruang Wilayah	Pemanfaatan Ruang	Luas (Ha)	(Km)	Persentase (%)
Sesuai	Hutan Lindung	Hutan	1418,90	14,19	31,38
	Hutan Produksi Biasa	Hutan	181,58	1,82	4,02

	Hutan Rakyat	Hutan	12,05	0,12	0,27
	Mangrove	Hutan	19,82	0,20	0,44
	Perkebunan	Kebun	339,25	3,39	7,50
	Permukiman	Permukiman	358,62	3,59	7,93
	Pertanian Lahan Basah	Sawah	411,59	4,12	9,10
	Tambak	Tambak	576,20	5,76	12,74
	Hutan Lindung	Sawah	2,02	0,02	0,04
		Pemukiman	0,42	0,00	0,01
	Hutan Produksi Biasa	Sawah	0,06	0,00	0,00
	Hutan Rakyat	Sawah	0,24	0,00	0,01
	Mangrove	Tambak	3,71	0,04	0,08
		Pemukiman	0,03	0,00	0,00
		Kebun	0,34	0,00	0,01
	Perkebunan	Hutan	119,49	1,19	2,64
		Sawah	61,93	0,62	1,37
		Tambak	17,67	0,18	0,39
		Pemukiman	62,70	0,63	1,39
	Permukiman	Hutan	16,96	0,17	0,38
		Kebun	42,32	0,42	0,94
		Sawah	266,31	2,66	5,89
		Tambak	72,24	0,72	1,60
Tidak Sesuai	Pertambangan	Hutan	214,88	2,15	4,75
		Kebun	3,43	0,03	0,08
	Pertambangan	Sawah	54,59	0,55	1,21
		Permukiman	7,72	0,08	0,17
	Pertanian lahan basah	Hutan	14,34	0,14	0,32
		Kebun	55,67	0,56	1,23
		Tambak	23,17	0,23	0,51
		Permukiman	57,19	0,57	1,26
	Peternakan besar	Kebun	14,03	0,14	0,31
		Sawah	1,06	0,01	0,02
		Tambak	3,97	0,04	0,09
		Permukiman	5,19	0,05	0,11
	Tambak	Hutan	21,12	0,21	0,47
		Kebun	26,20	0,26	0,58
		Sawah	2,10	0,02	0,05
		Permukiman	32,51	0,33	0,72
Total			4521,62	45,21	100

Tabel 4. Total Keseluruhan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kawasan Pesisir Kecamatan Barru

No.	Klasifikasi	Luas		Persentase (%)
		(Ha)	(Km)	
1.	Tidak Sesuai	1194,96	11,95	26,48
2.	Sesuai	3318,01	33,18	73,52

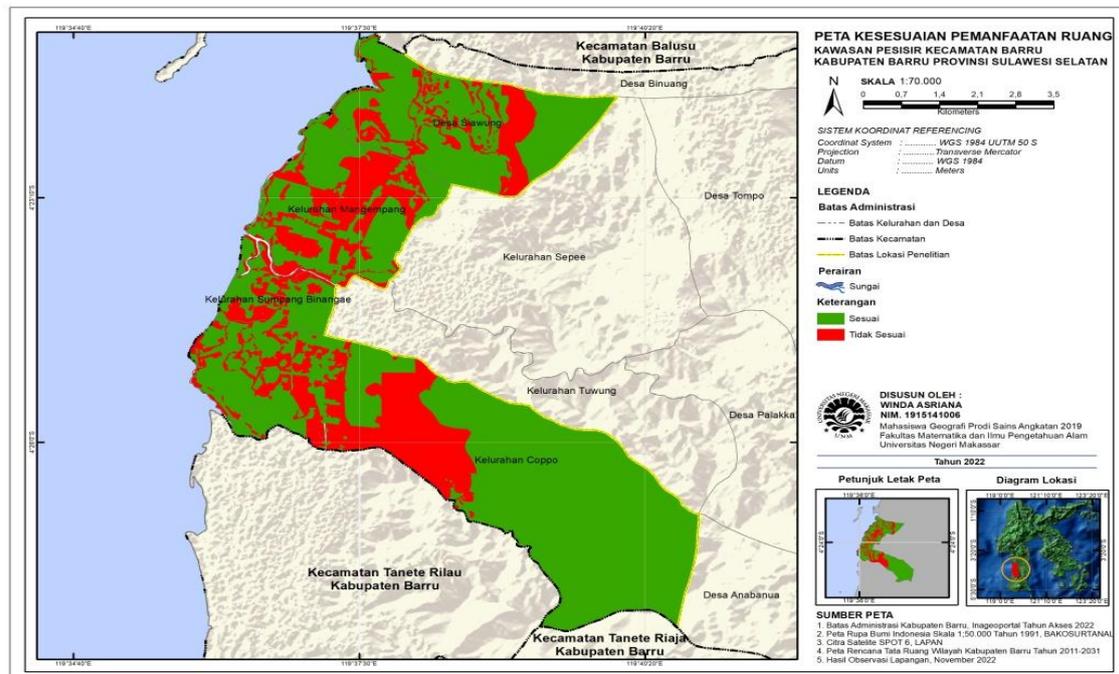
Total

4512,97

45,13

100

Kesesuaian pemanfaatan ruang di kawasan pesisir Kecamatan Barru ditunjukkan pada gambar 4 melalui peta berikut.



Gambar 4. Kesesuaian Pemanfaatan Ruang di Kawasan Pesisir Kecamatan Barru

Hasil analisis kesesuaian pemanfaatan ruang di Kawasan Pesisir Kecamatan Barru menunjukkan bahwa sebesar 73,52% atau 3.318,01 hektar dari total wilayah telah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang ditetapkan, terutama pada kawasan hutan lindung, pertanian lahan basah, dan tambak. Namun, terdapat 26,48% atau 1.194,96 hektar yang tidak sesuai, di mana lahan sawah yang direncanakan untuk permukiman merupakan pelanggaran terbesar sebesar 5,89%. Ketidaksesuaian ini mencerminkan tantangan dalam implementasi perencanaan tata ruang yang ideal, sebagaimana dijelaskan oleh Wahyudi (2019) dalam kajiannya yang menyoroti pentingnya evaluasi berkelanjutan untuk mengurangi ketidaksesuaian pemanfaatan ruang di kawasan pesisir agar sesuai dengan rencana tata ruang yang ditetapkan demi mendukung pembangunan berkelanjutan dan melindungi ekosistem lokal.

Adapun berdasarkan wawancara beberapa masyarakat setempat, penyimpangan penggunaan lahan yang terjadi disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor pertama yaitu kurangnya informasi dan pengawasan yang ketat mengenai adanya suatu perencanaan yang mengatur mengenai suatu wilayah dalam pemanfaatan lahannya. Hal tersebut relevan dengan penelitian yang dilakukan (Khaerani et al., 2018) yang menunjukkan hasil bahwa pengetahuan terkait rencana tata ruang yang rendah oleh masyarakat dapat menyebabkan ketidaksadaran bahwa tempat yang mereka tempati tidaklah sesuai atau salah. Bukan hanya itu, pemerintah yang kurang melakukan sosialisasi terkait RTRW kepada masyarakat dapat menyebabkan ketidaktahuan masyarakat akan rencana apa di lokasi tempat tinggalnya yang akan dibangun.

Faktor kedua, penduduk dan perkembangan wilayah yang semakin meningkat sehingga membutuhkan ruang yang lebih pula. Pertumbuhan penduduk pada tingkat

ekonomi dan sosial akan selalu sekalan dengan perkembangan maupun pertumbuhan sebuah kota. Hal ini juga didukung oleh (Hasriyanti et al., 2022) dalam bukunya bahwa penduduk dan pembangunan merupakan dua sisi yang tidak dapat dipisahkan. Sehingga peningkatan penggunaan lahan dilihat dari kawasan terbangun yang diperoleh dari citra satelit semakin tinggi. Dari sini terlihat bahwa kondisi tata guna lahan eksisting belum terencana dengan baik dan yang terjadi kemudian adalah peruntukan lahan tidak mengikuti arus rencana tata ruang dan wilayah.

Fenomena penyimpangan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan RTRW bukanlah hal yang hanya terjadi di kawasan pesisir Barru melainkan ditemukan pada berbagai penelitian lain diberbagai daerah di Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh Maru (2015) menyebutkan bahwa ketidaksesuaian tata guna lahan sering kali ditemukan di daerah-daerah dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang pesat, terutama di kawasan perkotaan dan pinggiran kota. Hal ini dikarenakan adanya tekanan untuk menyediakan lahan bagi kebutuhan perumahan dan industri seiring meningkatnya jumlah penduduk. etidaksesuaian ini semakin diperparah ketika masyarakat setempat kurang memahami atau kurang menerima sosialisasi mengenai rencana tata ruang yang ada. Kasus serupa juga ditemukan di wilayah pesisir lainnya seperti di Kota Makassar yang mengalami peningkatan pemanfaatan lahan tidak sesuai rencana akibat urbanisasi dan industrialisasi yang berkembang cepat (Sabitha, 2022).

Adapun faktor ketiga, yaitu adanya permukiman warisan leluhur masyarakat yang menetap sebelum adanya peraturan perencanaan. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan (Suwanda et al., 2018) yang menyatakan bahwa penyimpangan penggunaan lahan dipengaruhi oleh faktor dominan yaitu masyarakat yang secara turun temurun bermukim di kawasan tersebut untuk ditinggali dimana hal tersebut ditunjukkan banyaknya pada kawasan penyimpangan perkampungan lokal.

Yang keempat, penyimpangan tersebut terjadi karena kondisi ekonomi masyarakat yang memaksa mereka mengabaikan status lahan mereka legal atau illegal (Khaerani et al., 2018a) menyatakan, faktor legal dalam memilih tanah cenderung diabaikan oleh masyarakat dengan penghasilan rendah dikarenakan biaya yang terbatas. Sehingga, investasi pembelian lahan yang dapat dijadikan tempat tinggal terbatas untuk dilakukan.

Kelima, kondisi lahan tersebut dapat dikatakan belum terealisasikan sebagai lahan yang direncanakan pada RTRW sehingga terjadi penyimpangan. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan (Hariyanti, 2021) yang hasil penelitiannya menjelaskan bahwa terjadi ketidaksesuaian di pesisir Kota Probolinggo dikarenakan adanya pertumbuhan dimana kebutuhan untuk kepentingan pembangunan akan luasan lahan serta penggunaan penggunaan lahan dalam bentuk peta tahun 2020. Adapun pada tahun 2020-2040 digunakan pola ruang sendiri. Arinya, ketidaksesuaian sangatlah wajar terjadi dikarenakan pola ruang dilakukan pada masa awal berlakunya serta beberapa tahun kedepan yaitu jangka waktu 20 tahun, pola ruang akan melalui masa berakhirnya.

Kesimpulan

Penelitian ini mengungkapkan bahwa pemanfaatan lahan di pesisir Kecamatan Barru, terutama penggunaan hutan, memiliki kesesuaian tinggi dengan RTRW Tahun 2011-2031, dengan 73,52% penggunaan lahan sesuai dan 26,48% tidak sesuai. Ketidaksesuaian utama terjadi pada lahan sawah yang dialokasikan untuk permukiman dalam RTRW, yang disebabkan oleh kurangnya sosialisasi RTRW dan kebutuhan ekonomi masyarakat.

Implikasi praktisnya, penelitian ini mendukung kebijakan lingkungan berkelanjutan di pesisir dengan mengidentifikasi area yang perlu peningkatan pengawasan. Selain itu, peningkatan sosialisasi RTRW dan pengawasan dapat membantu mengurangi ketidaksesuaian pemanfaatan lahan. Dari perspektif akademis, penelitian ini menambahkan

pemahaman tentang pengelolaan ruang pesisir, terutama dalam menjaga ekosistem lokal dan keberlanjutan.

Pendekatan kombinasi citra SPOT-6 dan Sistem Informasi Geografis (SIG) dalam studi ini berkontribusi pada metodologi penelitian spasial di bidang perencanaan wilayah. Hasilnya memberikan dasar bagi penelitian lanjutan dan perbandingan dalam konteks tata kelola pesisir di Indonesia, sehingga mendukung pengembangan kebijakan berbasis data untuk pengelolaan wilayah yang berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Foley, M. M., Halpern, B. S., Micheli, F., Armsby, M. H., Caldwell, M. R., Crain, C. M., Prahler, E., Rohr, N., Sivas, D., Beck, M. W., Carr, M. H., Crowder, L. B., Emmett Duffy, J., Hacker, S. D., McLeod, K. L., Palumbi, S. R., Peterson, C. H., Regan, H. M., Ruckelshaus, M. H., ... Steneck, R. S. (2010). Guiding Ecological Principles for Marine Spatial Planning. *Marine Policy*, 34(5), 955–966. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2010.02.001>
- Freitas, J. G. de, James, R., & Land, I. (2022). Coastal Studies and Society: The Tipping Point. *Coastal Studies & Society*, 1(1), 3–9. <https://doi.org/10.1177/263498172111047765>
- Hariyanti, N. (2021). Studi Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Laut Berdasarkan RTRW dan RZWP-3-K di Wilayah Pesisir Kota Probolinggo. 1–83.
- Hasriyanti. (2014). Pemetaan Wilayah Produksi Rumput Laut di Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto. *Jurnal Sainsmat*, III(2), 176–184.
- Hasriyanti, H. (2021). Konservasi Lingkungan dan Sumber Daya (H. Hasriyanti (ed.)). Eureka Media Aksara.
- Hasriyanti, H., Salam, N. P., & Sartina, S. (2021). Local Wisdom in Sustainable Management of Marine Resources: A Case Study of Coastal Communities in Bone Regency. *LaGeografia*, 20(1), 77. <https://doi.org/10.35580/lageografia.v20i1.14650>
- Hasriyanti, Salim, A., Sulvina, E., Nur, M. M., Hadaniah, S., Nurfahraini, Z., Nurhalik, Maghfirah, F., Hamkah, D. P., Nasri, S. N., Iqbal, M., Fikri, M. J. N., Magfiratul, A., Basram, N. F., Triantika, R., & Jamiluddin, N. (2022). Geografi Penduduk dan Pembangunan. In *Eureka Media Aksara* (Vol. 1, Nomor 2).
- Hasriyanti, & Syarif, E. (2021). Strategi Pemberdayaan Sumber Daya Laut Melalui Kearifan Lokal Sistem Punggawa-Sawi di Desa Palalakkang Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar. *Jurnal Environmental Science*, 3(1), 1–13.
- Hidayah, Z., & Suharyo, O. S. (2018). Analisa Perubahan Penggunaan Lahan Wilayah Pesisir Selat Madura. *Rekayasa*, 11(1), 19. <https://doi.org/10.21107/rekayasa.v11i1.4120>
- Jattak, Z. U., & Wu, W. (2023). Advancing The Initiatives of Sustainable Coastal and Marine Areas Development in Pakistan Through Marine Spatial Planning. <https://doi.org/10.1177/00368504231218601>
- Junarto, R. (2023). Mitigasi Perubahan Iklim dan Dampak Pengelolaan Sumber Daya Agraria: Wawasan dari Indonesia. *Tunas Agraria*, 6(3), 237–254. <https://doi.org/10.31292/jta.v6i3.219>
- Khaerani, R., Sitorus, S. R. P., & Rusdiana, O. (2018a). Analisis Penyimpangan Penggunaan Lahan Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang. *Tataloka*, 20(4), 399. <https://doi.org/10.14710/tataloka.20.4.399-409>
- Khaerani, R., Sitorus, S. R. P., & Rusdiana, O. (2018b). Analysis of Land Use Deviation Based on Spatial Plan in Sumedang Regency. *Tata Loka*, 20(4), 399–409.
- Manaf, M. (2016). Analisis Pemanfaatan Ruang di Wilayah Pesisir Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Salayar. 10–21.
- Manasseh, R., Sannasiraj, S., McInnes, K. L., Sundar, V., & Jalihal, P. (2017). Integration of Wave Energy and Other Marine Renewable Energy Sources with the Needs of Coastal Societies. *The International Journal of Ocean and Climate Systems*, 8(1), 19–36. <https://doi.org/10.1177/1759313116683962>
- Maru, R., Nasaruddin, Ikhsan, M., & Laka M, B. (2015). Perubahan Penggunaan Lahan Kota Makassar Tahun 1990-2010 Alteration of Makassar City Land Purpose by. *Jurnal Sainsmat*, IV(2), 113–125. <http://ojs.unm.ac.id/index.php/sainsmat>
- Mubarak, H., Salim, A., & Bahri, S. (2024). Pengembangan Wilayah Pesisir Berkelanjutan di Kawasan Pesisir Kecamatan Barru Kabupaten Barru. *Urban and Regional Studies Journal*, 6(2), 254–264.

74 Analisis Kesesuaian Pemanfaatan Ruang di Lingkungan Pesisir . . .

<https://doi.org/10.35965/ursj.v6i2.4499>

- Nurliza, N., Dolorosa, E., & Erawati, A. (2018). Strategic Policy of Coastal Sustainability Based on Local Conditions and Needs in Sambas Regency, West Kalimantan. *AGRARIS: Journal of Agribusiness and Rural Development Research*, 4(1). <https://doi.org/10.18196/agr.4161>
- Rezapour, M., Yue, E., & Ksaibati, K. (2020). Integrating GIS and Statistical Approaches to Enhance Allocation of Highway Patrol Resources. *International Journal of Police Science and Management*, 22(1), 84–95. <https://doi.org/10.1177/1461355719888939>
- Sabitha, F. A. (2022). Analisis Pengaruh Tingkat Urbanisasi Terhadap Ketersediaan Lahan Lahan Permukiman Perumahan Di Kota Surabaya. *Jurnal Lemhannas RI*, 10(1), 19–26. <https://doi.org/10.55960/jlri.v10i1.268>
- Sanga, F., Liwenga, E. T., & Haulle, E. (2022). Land-Use Dynamics in Lupila Ward of Makete District in Southern Highlands of Tanzania. *Journal of Land and Rural Studies*, 10(1), 124–144. <https://doi.org/10.1177/23210249211051117>
- Simamora, J., & Andrie Gusti Ari Sarjono. (2022). Urgensi Regulasi Penataan Ruang Dalam Rangka Perwujudan Pembangunan Berkelanjutan. *Nommensen Journal of Legal Opinion*, 03, 59–73. <https://doi.org/10.51622/njlo.v3i1.611>
- Suwanda, W., Endarwati, M. C., & Widodo, W. H. S. (2018). Identifikasi Tipologi dan Faktor Penyebab Penyimpangan Penggunaan Lahan Di Kota Malang. *2018*, 1–12. <http://eprints.itn.ac.id/id/eprint/239>
- Wahyudi, A. (2019). Evaluasi Kesesuaian Lahan Dan Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Di Kecamatan Mandau. *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota*, 15(3), 189–213. <https://doi.org/10.14710/pwk.v15i3.21681>